

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA(RPJMDDES) DI DESA
PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

By : Maripah

Email : Khalisamarifah@gmail.com

Supervisor : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Public Administration at Politican and Socia Science Faculty

University Of Riau

Campu sBina Widya J. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 282993-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Village development planning is an initial step taken by the village head along with the authorities in the village development process to manage the resources so that the village community can enjoy. An interesting phenomenon in the participatory development planning process also took place in Pangkalan Baru Village, Siak Hulu District, Kampar District, especially on the aspect of community participation in the preparation of the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes). Planning comes from the word plan, which means the design or order of things to be done. From this simple understanding can be decomposed some important components, namely goals (what to achieve), activities (actions to realize the goal), and time (when, when the activity is about to do). This research uses qualitative research methods with descriptive data assessment. In data collection, researchers used interview techniques, observation and study literature. By using key informant and informant afterwards as source of information. The results of this study indicate that several stages of the development planning process in each village has not been implemented. At Sub-district Musrenbang level several stages of the development planning process have not been implemented, especially at the stage where the community has not been involved decide the priority of activities to be submitted to the district development planning process. And community participation in development planning in Siak Hulu District Kampar Regency is still low.

Keywords: Participatory Development Planning

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat.

Pembangunan itu sendiri mempunyai tujuan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan. Yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (partisipasi). Terutama pada tahap perencanaan yang merupakan tahap yang paling vital dalam proses pembangunan, karena perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Berdasarkan asumsi dari para pakar pembangunan bahwa semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan adalah dua terminologi yang tidak bisa dipisahkan. Pendapat tersebut secara rasional dapat diterima karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar pembangunan bisa sukses (Arif, 2006 : 149-150).

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang

berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 bahwa Desa merupakan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang harus kita pahami bahwa dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan 2 (dua) proses : pertama, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, maka RPJM-Desa harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses menggali gagasan dan aspirasi masyarakat serta menemukan potensi, masalah dan penentuan tindakan. Kedua, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan jangka waktu 1 (tahun).

Fenomena menarik pada proses perencanaan pembangunan partisipatif juga terjadi di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terutama pada aspek partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diantaranya meliputi mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT sampai pada musrenbang Desa belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Kegiatan musrenbag Desa yang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar nyatanya hanya merupakan kegiatan formalitas yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan sebagian kecil tokoh masyarakat yang sama sekali belum mewakili untuk penyampaian aspirasi masyarakat Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sehingga pada akhirnya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan tanpa berdasar pada usulan dari masyarakat, melainkan hanya berupa asumsi dan perkiraan oleh sekelompok dari aparat desa.

Selain itu, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornament-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternative-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data atau fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, efeknya adalah muncul apatisme dari masyarakat mengenai perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar

masyarakat. Sehingga pada waktu proses perencanaan tidak ada “sense” yang muncul dari masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan karena belum ada pemberitahuan secara rinci dari pihak pemerintah desa mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan, apa dan bagaimana musrenbagdes, untuk kepentingan apa dan sebagainya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka perlu kiranya untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan mendeskripsikan dan menganalisis factor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan partisipatif dalam penyusunan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
2. Faktor- factor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pangkalan Baru kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa

Pangkalan Baru kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis menjadi bahan kajian teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara serta dimanfaatkan untuk menambah wawasan intelektual mengenai perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Secara praktis sebagai bahan rujukan, pertimbangan, dan pemikiran bagi pemerintah desa khususnya Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam rangka perencanaan pembangunan secara partisipatif.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan

Pengertian perencanaan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya.

Istilah perencanaan sudah sangat umum kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut dan banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Lebih dari itu, diantara pakar pun belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan. Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002 : 19) mendefinisikan

perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut, Arsyad (2002 : 19-20) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Dari berbagai dimensi pengertian dapat dikatakan bahwa suatu perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi dan faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian ini memuat hal-hal prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan, yakni (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi; (2) bagaimana mencapai hal tersebut; (3) siapa yang akan melakukan; (4) lokasi aktifitas; (5) kapan akan dilakukan, berapa lama, dan (6) sumber daya yang dibutuhkan (Alexander Abe, 2005).

GR. Terry (2003) mengemukakan bahwa perencanaan dikerjakan terus menerus dan merupakan suatu kegiatan yang yang tidak pernah selesai. Seluruh rencana bersifat sementara dan dapat dirubah atau diganti apabila ada fakta-fakta baru dan variabel-variabelnya perlu dievaluasi kembali. Rencana-rencana umumnya ditinjau kembali secara teratur dan apabila perlu segera dirubah untuk menghadapi situasi yang baru.

Adapun pengertian perencanaan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. The New Webster Dictionary
Rencana diartikan sebagai pernyataan dari segala sesuatu yang dikehendaki yang digambarkan dalam suatu pola-pola atau peta-peta, gambar atau pernyataan dari bagian-bagiannya sesuai dengan pola tertentu.
- b. Drs. H. Malayu. SP. Hasibuan
Rencana adalah suatu keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Harol Koontz dan Cyril O'donnel
Perencanaan adalah fungsi seorang manajer/pemimpin yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada.
- d. G.R. Terry
Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kepentingan-kepentingan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- e. Louis Allen
Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Billy E. Goets
Perencanaan adalah memilih yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika terdapat alternatif-alternatif.
- g. T. Hani Handoko
Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Jadi, perencanaan adalah pemilihan yang fundamental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

2.2 Pembangunan

Todaro (2000 : 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya

fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan system ekonomi dan social. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Riant Nugroho (2003 : 67-68) mengatakan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warganegara dan dunia internasional, dan menyerap hampir seluruh sumber daya Negara bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan di-management. Kata Nugroho, perencanaan pembangunan menjadi kunci karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang maha rumit. Seperti diketahui, istilah "pembangunan" adalah istilah khas dari proses rekayasa social (dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh Negara-negara berkembang.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya public yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sector swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004 : 15).

Ginjar Kartasmita (1997 : 48), mengatakan perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam

administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

2.3 Partisipatif

Dari kajian literature tentang partisipasi masyarakat di Negara-negara berkembang menunjukan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas, seperti yang disampaikan Cohen dan Uphoff (1997 : 20), bahwa : “Partisipasi dapat dilihat dari berbagai pandangan (perspective). Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan program, serta menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komuniti mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka”.

Menurut FAO seperti yang dikutip Mikkelsen (1999 : 64). Berbagai penafsiran yang berbeda dan sangat beragam mengenai arti kata tentang partisipasi yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks dan dampak social.
4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Sastropoetro (1988 : 51), definisi partisipasi yang dikutip dari beberapa ahli, sebagai berikut :

1. Gordon Allport, menyatakan bahwa partisipasi keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dari pada hanya jasmaniah/fisik saja.
2. Keith Davis, menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya.
3. Achmadi, menyatakan partisipasi dalam bentuk swadaya gotong-royon merupakan modal utama. “Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan”.
4. Santoso S. Hamidjoyo, menyatakan Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan, menerima kembali hasil pembangunan dan tanggung jawab terhadapnya, dan terwujudnya kreativitas dan otonomitas.
5. Alastaire White, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.
6. Santoso Sastropoetra, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan spontan dalam kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
7. Daryono, SH, menyatakan Partisipasi berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari

prioritas, dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan.

Kemudian seperti yang dikutip Ndraha (1987 : 102), Nelson (Bryant dan White) menyebut dua macam partisipasi, yaitu: “partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, atau antar klien dengan patron atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertical”.

2.4 Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach).

Korten dalam Supriatna (2000 : 65) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Begitu juga menurut Conyers (1991: 154), yang mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu: *Pertama*, partisipasi masyarakat

merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan *Kedua*, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. *Ketiga*, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Sanit (dalam Suryono 2001: 32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan partisipasi masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu: *Pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik, oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Menurut Davis seperti yang dikutip Sastropoetro (1988: 16), bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu :

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa,
- b. Sumbangan spontan berupa uang atau barang,
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu / instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga),
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas (biasanya diputuskan

- oleh rapat komuniti, antara lain : rapat desa yang menentukan anggarannya),
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat,
 - f. Aksi massa,
 - g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri,
 - h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Menurut Moeljarto (1987 : 48-49), partisipasi menjadi amat penting, terdapat beberapa alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka milik.
5. Partisipasi memperluas zona (wawasan) penerima proyek pembangunan.
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.

10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri

Menurut Riant Nugroho (2006:163) proses penyusunan perencanaan baik itu jangka panjang, menengah maupun tahunan di bagi menjadi empat tahap yaitu :

1. Evaluasi kinerja
Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga pelaksana, kualitas rencana sebelumnya, serta untuk memperkirakan kapasitas pencapaian kinerja dimasa yang akan datang
2. Penyusunan perencanaan
Penyusunan rencana terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut (1) penyiapan rancangan pembangunan oleh lembaga perencana dan bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh dan terukur (2) penyiapan rencana kerja oleh lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan kewenangan.
3. Penetapan Perencanaan
Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya
4. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan kinerja mencakup input (masukan), output (keluaran), result (hasil), benefit (keuntungan), dan impact (dampak)

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penulis melakukan penelitian di desa tersebut

dengan alasan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan yaitu orang yang dianggap mengerti permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah sebagai berikut :

Table 3.1
Data Informan

No.	Informan
1	Sekretaris Desa
2	Ketua BPD
3	Ketua LPM
4	Organisasi Masyarakat
5	Tokoh Masyarakat

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2017

3.3 Jenis Pengumpulan Data

- a. Data Primer
Data primer didapat dari penelitian langsung di lapangan, yaitu dengan cara wawancara kepada informan dan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berada di dalam lingkungan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- b. Data Sekunder
Data sekunder didapat dari telaah pustaka serta pihak yang berkaitan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna data yang ada. Data tersebut berupa catatan dan laporan. Adapun data sekunder tersebut yaitu:
 - Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

- Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
Mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, pencatatan dan mendokumentasikan secara cermat dan sistematis.
- b. Wawancara
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan bahasa yang dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan persepsi masyarakat, data yang diperoleh penulis melalui wawancara ini yaitu informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan melakukan pencatatan dan rekaman percakapan.
- c. Dokumentasi
Berupa sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terlepas pada ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi dimasa lalu.
- d. Studi pustaka
Yaitu pengumpulan data penelitian dengan cara membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini telaah pustaka yang dilakukan penulis

meliputi membaca dan menyalin buku dalam pustaka Universitas Riau, membuka dan menyalin situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Analisis data

Analisis terhadap data penelitian dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah dengan membuat klasifikasi terhadap benda-benda, orang-orang atau kejadian-kejadian atau kepemilikan yang menjadi kerekturnya, sehingga diperoleh rangkaian analisis yang rinci dan sistematis.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu penganalisaan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dan kemudian data tersebut dianalisa dan ditelaah tanpa menggunakan perhitungan – perhitungan angka melainkan dengan cara pemikiran yang logis berdasarkan teori-teori, data lapangan, pendapat serta pernyataan-pernyataan yang mendukung penganalisaan penelitian ini.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan seleksi masalah dan kebutuhan tersebut dilaksanakan di salah seorang rumah warga yang dapat menampung banyak jumlah peserta, yang dihadiri oleh Ketua RT, perangkat RT, dan seluruh warga di lingkungan RT yang bersangkutan. Tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan pada setiap RT umumnya rendah. khususnya warga perempuan yang nggan keluar rumah setelah solat magrib, karena kegiatan

penyelidikan biasanya diselenggarakan pada malam hari (ba'da magrib). Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga Desa Pangkalan Baru yang juga merupakan anggota PKK adalah sebagai berikut:

"Saya belum pernah hadir dalam kegiatan penyelidikan di RT, males karena acaranya malam, biar suami saja yang datang kan sudah mewakili keluarga. Sedangkan kita perempuan ngga bagus kalo keluar malam apalagi bila tidak ditemeni oleh muhrim". (Wawancara tanggal Maret 2017)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Pangkalan Baru sebagai berikut:

"Pernah beberapa kali hadir dalam kegiatan membahas masalah dan kebutuhan masyarakat, waktu itu memenuhi undangan Bapak RT, namun apa yang kita usulkan dalam kegiatan penyelidikan ternyata tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, kesininya saya males hadir...." (wawancara Maret 2017)

Dari pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa jarak antara satu rumah dengan yang lainnya yang cukup jauh di Desa menjadi penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan tersebut. Bagi desa lain waktu penyelenggaraan kegiatan penyelidikan pada malam hari (ba'da maghrib) dijadikan sebagai salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan tersebut. Pilihan waktu kegiatan penyelidikan diselenggarakan pada malam hari dengan alasan bahwa pada malam hari semua warga terlepas dari aktivitas rutinnnya sehingga dapat meluangkan waktu untuk berkumpul membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dari dua informan di atas menunjukkan bahwa masalah dan kebutuhan yang diusulkan di tingkat desa tidak seluruhnya berasal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan di tingkat RT, bahkan untuk beberapa dusun

ide usulan yang dirumuskan digali oleh elit desa seperti kades dan perangkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, tidak semua RT dalam satu desa menyelenggarakan kegiatan penyelidikan. Bagi RT yang tidak menyelenggarakan kegiatan penyelidikan mempunyai alasan tertentu, yakni sebelum masalah dan kebutuhan yang diusulkan tahun kemarin ditindaklanjuti maka pihak RT tidak akan melakukan penggalian masalah dan kebutuhan di tahun berikutnya. Mengingat masalah dan kebutuhannya masih sama bila belum diupayakan pemecahannya.

Fenomena usulan dalam musrenbang desa didominasi kegiatan fisik sebagaimana dilaksanakan di Desa Pangkalan Baru. Meskipun demikian prioritas kegiatan yang diusulkan untuk masing-masing desa berbeda, prioritas kegiatan yang diusulkan adalah kebutuhan yang mendesak bagi warga yaitu pembangunan jalan, terutama jalan yang menghubungkan antar desa lain. Kebutuhan tersebut sudah masuk dalam daftar usulan prioritas desa dan merupakan usulan lama yang belum teralisasi sehingga diusulkan kembali tahun ini.

Begitu pun dengan Desa Pangkalan Baru, usulan prioritasnya adalah bantuan dana/modal untuk usaha disamping kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga Desa Pangkalan Baru berikut:

” sebenarnya kebutuhan warga adalah pinjaman untuk modal usaha, karena saya pengrajin bambu yang kekurangan modal, padahal sedang banyak pesanan dari luar, karena kurang modal jadi ga beroperasi, bukan hanya saya yang butuh pinjaman dengan bunga yang murah..... kalau ada pinjaman dari pemerintah Insya Allah bisa jalan lagi usahanya”. (Wawancara tanggal 15 Maret 2017).

Untuk warga petani sudah mendapatkan bantuan dari program PPK IPM pinjaman berupa binatang ternak

(domba dan sapi) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Desa adalah pipanisasi untuk menampung air bersih. Struktur tanah yang hanya mampu menampung sedikit air di desa Pangkalan Baru menyebabkan masyarakat kekurangan air bersih di waktu musim kemarau, sehingga dirasa perlu untuk segera membangun pipanisasi air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Pangkalan Baru. Usulan pipanisasi ini sebenarnya merupakan usulan tahun kemarin yang diusulkan kembali pada tahun sekarang. Meskipun kebutuhan ini sangat mendesak namun belum masuk dalam daftar usulan prioritas kegiatan di musrenbang yang lebih tinggi, sehingga belum terealisasi pada tahun ini. Di tingkat musrenbang kecamatan, usulan dari masing-masing desa bersaing dengan usulan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah).

Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa pemahaman warga tentang proses perencanaan pembangunan belum merata di seluruh masyarakat Kecamatan Siak Hulu. Sehingga kurang memahami ketika ditanya kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Ini ditandai dengan beberapa kegiatan prioritas yang diusulkan desa tidak terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan.

4.2 Perencanaan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka

Sebagian besar penjangkaran aspirasi masyarakat di Desa Pangkalan Baru dilakukan ditingkat dusun. Penjangkaran aspirasi ini dilakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan musrenbang desa. Meskipun penjangkaran aspirasi masyarakat/ kegiatan

penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat Desa Pangkalan Baru pada umumnya dilakukan di tingkat dusun namun tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah, berikut alasan yang dikemukakan oleh Lurah Siak Hulu:

"....Mengingat jumlah penduduk Desa Pangkalan Baru paling banyak dibanding desa lain di Kecamatan Siak Hulu bahkan di kabupaten Kampar, tentunya kami kesulitan untuk dapat mengakomodasi semua masalah dan kebutuhan warga melalui forum warga di tingkat RT. Oleh karena itu kami melakukan forum warga di tingkat dusun dengan peserta para ketua RW dan pengurusnya, asumsi saya bahwa masing-masing ketua RW dapat memahami dan hafal betul apa yang menjadi masalah, potensi serta kebutuhan masyarakatnya...." (wawancara tanggal Maret 2017)

Senada dengan alasan Lurah Siak Hulu, Kepala Dusun 2, Usep Syahbaeni mengemukakan alasan berikut:

"Idealnya masyarakat secara keseluruhan mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tetapi karena keterbatasan waktu, tempat dan kesibukan dari warga yang tidak memungkinkan diadakannya forum warga di tingkat RT.....dan saya rasa ini cukup mewakili apa yang dibutuhkan seluruh warga dusun 2....." (wawancara tanggal Maret 2017)

Pernyataan Kepala Desa Siak Hulu di atas dibuktikan dengan program pertemuan yang melibatkan masyarakat yang dijadwalkan setiap satu bulan sekali, dan beberapa program pembangunan Desa yang didanai dari swadaya masyarakat murni seperti membangun 3 lokal sekolah diniyah, dan membangun mesjid. Pandangan di atas dibenarkan oleh salah seorang perangkat desa Siak Hulu berikut ini:

"Pak Kades selalu menyempatkan turun ke RT/RW dalam setiap bulannya. Dari

kunjungan tersebut diperoleh banyak informasi mengenai kondisi masyarakat, Pak kades juga menginstruksikan kepada seluruh RT/RW untuk selalu berkomunikasi dengan beliau bila menemukan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat". (Wawancara Maret 2017)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk beberapa desa, perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Seperti Desa Pangkalan Baru, Desa Sukasirna dan sebagian Desa Pangkalan Baru dimana kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan di level dusun sehingga hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hanya sebagian kecil desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu yang telah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka, seperti Desa Siak Hulu dan Desa Pangkalan Baru.

4.3 Legalitas Perencanaan

Legalitas disini maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Siak Hulu sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah Undangundang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan dan pelaporan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Mekanisme perencanaan pembangunan diatur dalam peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun tidak semua Desa menyelenggarakan

proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa berikut:

"Mekanismenya mengikuti mekanisme tahun yang lalu, saya belum menguasai Undang-undang No. 25 Tahun 2004, dan itu pun baru didapat kemarin dari Kecamatan.....Peraturan bupati.....saya belum menguasai juga....saya rasa perangkat desa pun belum menguasai seperti saya....." (Wawancara tanggal 15 Maret 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Kades sebagai berikut:

"Mekanisme musrenbang berdasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 belum dilaksanakan disini, musrenbang kemarin masih menggunakan model lama, tapi melibatkan unsur masyarakat, karena kalau tidak begitu nanti di demo oleh masyarakat sini....." (Wawancara tanggal 15 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kurang pahamnya Kepala desa dan perangkat desa terhadap Mekanisme perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 belum disosialisasikan dengan baik kepada pemerintah desa dan masyarakatnya, sehingga mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan menggunakan cara yang turun temurun dari kades periode sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Camat sebagai berikut:

"Semuanya berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, tentunya sesuai dengan etika dan nilai yang berkembang di masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya masyarakat yang mengatur.....tentunya

tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang, walaupun ada itu bukan salah perencanaannya tapi salah orangnya" (Wawancara tanggal 15 Maret 2017)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sehingga sesuai sumber hukum dalam perencanaan pembangunan dan menjunjung etika dan nilai yang ada di masyarakat.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum dilaksanakan secara optimal
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih rendah, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Fokus perencanaan, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW belum dilakukan secara menyeluruh.
 - b. Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses

- perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.
- c. Sinergitas Perencanaan yaitu proses perencanaan Pembangunan di Kecamatan Siak Hulu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama walaupun adakalanya tidak sinkron.
 - d. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik karena ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

5.2 Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur

pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan

pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

4. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Siak Hulu. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2001, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, penerbit Pondok Edukasi, Solo
- Bintaro, 1983. *Intraksi Desa-desa dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Brataha, I. Niyoman, 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bryant C and White, LG. 1982. *Managing Development in The Third world*. Boulder, Colorado : West View Press.
- Conyer, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hasan, Iqbal. M. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Michael, Todaro, 1997, *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2001, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mubiyarto, 1980, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Nasution, M. Arifin. 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Medan.
- Nugroho, Riant : 2003, *Reinventing Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Ndara, Talizuduhu, 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta : PT Bina Aksara.
- Oakley, Peter, et al, 1991. *Projects With People, The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva : International Labour Office.
- Riyadi dan Bratakusumah, D. S, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT.. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Roger E. M. 1983. *Modernization Among Peasant : The Impact of Communication*. New York. Holt, Rinehart, and Wiston
- Sastropoetro, Santoso R. A, 1998. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni.
- Siagian, Sondang. P, 1980, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono, Sukanto. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES